

PERAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Septira Indri Novanda¹, Qonita Humaidah Sari², Ardhia Regita Pramesti Cahyani³, Aulia Rahma⁴, Mahfud Syahfrudin Wibi⁵

¹ septira.indri.2404216@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Pancasila as Indonesia's state ideology has a major role in shaping tolerance among religious communities. Pancasila, with its principles that emphasize humanity, unity, and social justice, provides moral and ethical principles that support inter-religious harmony. This article analyzes how Pancasila, through its principles, can be used as a means of educating and promoting religious tolerance. Through this approach, it is hoped to create a more open and understanding environment, where individuals can live in a fair and discrimination-free environment. Pancasila has a great opportunity to be an optimal tool to build tolerance among religious communities. Through understanding and implementation of Pancasila values, it is expected to strengthen harmony and unity between religious communities. The author uses a descriptive qualitative research method through a literature study, or what is often called a Literature Review, which is a research approach that uses secondary data in the form of literature, journals, and other sources. secondary data in the form of literature, journals, books, scientific articles, and other documents as the main source of information.

Keywords: Pancasila; Toleracy, Society

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran utama dalam membentuk sikap toleransi antara umat beragama. Pancasila dengan prinsip-prinsip yang menonjolkan pada aspek kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, menyediakan asas moral dan etika yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Artikel ini menganalisis bagaimana Pancasila, melalui prinsip-prinsipnya, dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan mempromosikan toleransi umat beragama. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan penuh pengertian, dimana setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Pancasila memiliki peluang yang besar untuk menjadi sarana yang optimal untuk membangun sikap toleransi antar umat beragama. Melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat mempererat kerukunan dan kesatuan antar umat beragama. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, atau yang sering disebut dengan Literature Review, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya sebagai sumber utama informasi.

Kata kunci: Pancasila; Toleransi; Masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, atau sering disebut sebagai bangsa multikultural. Hal ini merujuk pada keberadaan berbagai macam keragaman yang ada di dalam

masyarakatnya, mulai dari agama, ras, suku, budaya, bahasa, hingga berbagai aspek kehidupan lainnya. Keragaman ini menjadikan Indonesia sebuah negara yang istimewa dan sangat layak menyandang julukan *a multicultural country*. Konsep keberagaman yang plural dan multikultural ini tercermin dalam semboyan nasional, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika." Semboyan ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang memiliki arti *berbeda-beda tetapi tetap satu jua*. Makna mendalam dari semboyan ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia tetap bersatu dalam harmoni meskipun memiliki berbagai perbedaan. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia memiliki identitas nasional yang kuat dan unik. Identitas ini tercermin dalam kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan menghormati keberagaman. Sikap toleransi inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia, sekaligus pembeda utama dari negara-negara lain di dunia. Toleransi memainkan peran penting sebagai fondasi utama dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat yang sangat beragam. Berkat sikap toleransi ini, keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tetap terlindungi dan terbangun dengan baik. Dalam konteks masyarakat yang begitu plural, setiap individu diharapkan untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Hal ini mencakup kemampuan untuk saling menghargai, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan dengan damai tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau budaya. Sikap toleransi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman yang ada. Dengan sikap ini, masyarakat Indonesia tidak hanya mampu hidup bersama dalam keragaman, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih indah dan bermakna. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah besar yang dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan usaha bersama dalam mengarahkan keberagaman ini ke arah yang lebih positif dan konstruktif. Mengimplementasikan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari memiliki tujuan yang mulia, yaitu menciptakan kehidupan yang mengutamakan persatuan tanpa memandang adanya perbedaan atau latar belakang apapun. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat terus membangun kehidupan yang harmonis, menjaga kebersamaan, dan mengukir masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Toleransi bukan saja didefinisikan sebagai sikap namun juga sebagai kesadaran dan cara berpikir yang memaksa kemauan diri untuk menerima dan menghormati perbedaan (Shofa, 2022:673). Dalam kehidupan bermasyarakat yang serba majemuk ini muncul perbedaan-perbedaan yang ada seperti, budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan golongan hal tersebut adalah sebuah fakta yang perlu diperhatikan agar selalu memajukan bangsa Indonesia dan mengarah cita-cita negaraberprinsip pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ekstremisme agama telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Menurut Laba dan Saingo (2023), semakin maraknya keterlibatan oknum masyarakat dalam ekstremisme agama menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas sosial, toleransi, dan keamanan nasional. Situasi ini menciptakan ancaman potensial yang perlu ditangani dengan serius. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji peran Pancasila sebagai alat penting dalam mengatasi dan mencegah ekstremisme agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal dengan identitas kemajemukannya yang harus dijaga dalam bingkai persatuan, tanpa adanya diskriminasi, intoleransi, atau sentimen terhadap kelompok yang berbeda. Walaupun Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luas, semangat gotong royong dan rasa persatuan tetap menjadi karakteristik yang melekat. Semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti *berbeda-beda tetapi tetap satu*, menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman. Walaupun terdapat berbagai agama di Indonesia, masyarakatnya umumnya dikenal toleran terhadap perbedaan agama, dengan tradisi saling menghormati dan merayakan hari besar keagamaan bersama antar komunitas agama. Seperti yang dikemukakan oleh Shofa (2022:146), Pancasila disahkan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" dan hingga saat ini

telah berhasil menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada bahkan sebelum kemerdekaan, dan terus relevan hingga saat ini. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila perlu dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya agar nilainya dapat tertanam dalam jiwa dan karakter masyarakat. Untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup, diperlukan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat toleransi dan kebangsaan. Sikap toleransi dalam kehidupan beragama menjadi cerminan positif bagi Indonesia dalam mewujudkan negara yang berdasarkan Pancasila. Namun, sikap intoleransi justru menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Intoleransi dapat menyebabkan penurunan citra Indonesia dan mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Intoleransi ini, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama." Oleh karena itu, penting untuk menegakkan dan memelihara nilai-nilai toleransi demi menjaga persatuan dan keberagaman bangsa.

METODE

Dalam pembuatan artikel ini penulis memakai metode penelitian kualitatif naratif menggunakan studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2018: 213) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yg berlandaskan dalam filsafat yg digunakan buat meneliti dalam syarat ilmiah (eksperimen) dimana peneliti menjadi instrumen, teknik pengumpulan data & dianalisis yg bersifat kualitatif lebih menekankan dalam makna. Dan bertujuan untuk menggali informasi secara luas dan mendalam tentang berbagai kondisi yang ada dan situasi yang muncul di masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial dan politik. Bentuk toleransinya dapat ditunjukkan dengan kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Segaran, kegiatan bersama atau hubungan kerjasama antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, atau yg tak jarang diklaim menggunakan Literature Review, merupakan suatu pendekatan penelitian yg memakai data sekunder berupa literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, & dokumen lainnya menjadi asal primer informasi. Kemudian data-data dianalisis, diklasifikasikan dan dideskripsikan untuk sampai pada sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pancasila dalam Membangun Sikap Toleransi Antar Umat Beragama di Lingkungan Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa, yang mencerminkan masyarakat multikultural. Keberagaman ini, sebagaimana dijelaskan oleh Akhmadi (dalam Derung dkk., 2022:259), dapat menjadi kekuatan yang unik jika dikelola dengan baik. Namun, keberagaman yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan ideologi negara memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.

Hubungan Agama dalam Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Hal ini tercermin dalam sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama di Indonesia. Sila ini mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan

ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam perumusannya, Pancasila lahir dari semangat persatuan yang bertujuan untuk menyatukan keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak hanya menjadi simbol penghormatan kepada Tuhan, tetapi juga menjadi landasan etis untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Sila ini menanamkan prinsip bahwa setiap agama berkontribusi terhadap pembentukan moral bangsa dan mendukung persatuan nasional. Oleh karena itu, Pancasila menjadi wadah yang memfasilitasi kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati.

Hubungan agama dan negara di Indonesia berdasarkan Pancasila tidak bersifat sekuler, tetapi juga tidak teokratis. Negara memberikan pengakuan terhadap agama-agama resmi dan menjamin kebebasan beragama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dengan ini, negara tidak hanya bertugas melindungi keberagaman agama, tetapi juga mengelola hubungan antaragama agar tetap harmonis. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan beberapa agama resmi yang diakui untuk menjamin pelayanan keagamaan dan mencegah diskriminasi.

Menurut Shaleh dan Wisnaeni (2019), hubungan antara agama dan negara dalam konteks Pancasila menghadirkan konsekuensi hukum yang unik. Negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan pluralisme hukum yang harmonis. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai-nilai agama terintegrasi dalam politik hukum tanpa mengorbankan keberagaman budaya dan keyakinan di masyarakat.

Selain itu, negara dan agama memiliki hubungan simbiotik, di mana agama membantu memberikan landasan moral dan etika, sementara negara menyediakan kerangka hukum untuk mengatur keberagaman. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir seperti Mohammad Husein Haikal dan Fazlur Rahman, yang menegaskan bahwa negara memerlukan agama untuk memperkuat etika dan moral dalam pemerintahan. Sebaliknya, agama memerlukan negara untuk mendukung penyebaran nilai-nilainya di tengah masyarakat.

Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai Dasar Toleransi

Sila pertama Pancasila memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap keberagaman agama di masyarakat. Prinsip ini mengajarkan bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang mengakui dan menghargai keyakinan orang lain. Dalam praktiknya, nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" menekankan bahwa kehidupan bermasyarakat harus dilandasi oleh semangat kebersamaan dan saling pengertian, meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan agama.

Sebagai fondasi utama toleransi, sila ini juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai ini dapat terlihat dari sikap saling membantu antar umat beragama tanpa memandang perbedaan. Dengan demikian, sila pertama tidak hanya menjadi simbol keimanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan kerukunan dan stabilitas sosial.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat

Hani Risdiyani (dalam Tamba dkk., 2023:99) menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Toleransi Tinggi: Menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama.
2. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial: Aktif dalam kegiatan seperti kerja bakti, ronda malam, dan kegiatan amal.
3. Kepemimpinan yang Bijaksana: Memiliki integritas dan kualitas kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
4. Musyawarah untuk Mufakat: Mendukung pengambilan keputusan bersama dalam forum atau organisasi.
5. Keadilan dan Tanggung Jawab: Memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan hati nurani serta mematuhi hukum dan norma yang berlaku.

Implementasi nilai-nilai ini juga dapat dilihat dalam upaya masyarakat untuk membangun solidaritas melalui kegiatan lintas agama, seperti kerja sama dalam penanggulangan bencana atau perayaan hari besar agama yang melibatkan semua kalangan. Kegiatan seperti ini mencerminkan semangat kebersamaan yang diajarkan oleh Pancasila.

Toleransi sebagai Mekanisme Sosial

Toleransi dalam konteks Pancasila adalah salah satu mekanisme sosial yang penting dalam menghadapi keberagaman agama di Indonesia. Fitriani (2020:182) menegaskan bahwa toleransi merupakan kunci utama untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Sikap toleransi ini memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai tanpa diskriminasi. Pancasila, khususnya sila "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengajarkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, keberagaman agama harus dilihat sebagai kekayaan yang memperkuat bangsa. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan mampu menjaga kerukunan melalui interaksi yang saling menghormati dan menghargai.

Toleransi dalam Pancasila juga mendorong kerja sama antar umat beragama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Misalnya, penyelenggaraan pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini dapat membantu membentuk generasi yang lebih menghargai keberagaman. Demikian pula, kerja sama ekonomi lintas agama dapat memperkuat solidaritas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan penuh toleransi, sehingga keberagaman menjadi sumber kekuatan dalam membangun bangsa yang bersatu.

Perwujudan sikap toleransi antar umat beragama di masyarakat

Pada hakikatnya toleransi adalah suatu sikap penerimaan terhadap perbedaan sosial dan agama. Dengan menghormati perbedaan individu dan kelompok. Maka dengan adanya toleransi tidak akan terjadi sebuah perpecahan pada masyarakat individu tau kelompok. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, toleransi merupakan sikap atau sifat untuk menerima, menghargai, atau membiarkan adanya perbedaan dalam pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan sebagainya yang berbeda dari keyakinan atau pendirian kita sendiri. Beberapa contoh penerapan toleransi antara lain toleransi dalam agama, suku, ras, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa toleransi yaitu sikap menghargai dan menerimaperbedaan yang dimiliki oleh orang lain.

Dalam menerapkan toleransi beragama, kita harus memiliki prinsip-prinsip yang dapat membawa kebahagiaan dan ketentraman, antara lain:

1. Kebebasan beragama adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia, yang membedakan manusia dari makhluk lain. Yang paling penting dalam kehidupan

adalah kebebasan untuk berpikir, bertindak, serta memilih keyakinan atau agama sesuai dengan kehendak pribadi.

2. Penghormatan Kepada Eksistensi Agama Lain

Memberikan kebebasan dalam beragama merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi agama lain. Ini berarti kita harus menghargai keberagaman ajaran dan keyakinan setiap agama, yang menjadi bagian dari etika toleransi yang harus dipegang teguh.

3. Setuju Dalam Perbedaan

Menurut Mukti Ali, prinsip ini menekankan pentingnya perdamaian dan menghindari permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda. Perbedaan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan, namun tidak seharusnya menyebabkan pertentangan. Masyarakat berkewajiban untuk memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama dengan menjaga sikap saling menghormati, empati, introspeksi diri, dan keterbukaan untuk memperbaiki keadaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama, masyarakat perlu melakukan hal-hal berikut:

1. Peningkatan Pemahaman dan Penghayatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap wawasan kebangsaan, yang tentunya berkaitan dengan nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Memperkuat iman pribadi menjadi salah satu langkah untuk menciptakan toleransi, dengan pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan saling menghormati.
3. Mengembangkan Toleransi Antar Umat Beragama Mengembangkan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan antar umat beragama sebagai bagian dari kehidupan bersama.
4. Peningkatan Pemahaman dan Penghargaan terhadap Nilai Kekeluargaan Antar Agama Mengembangkan rasa kekeluargaan antar umat beragama dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang, persaudaraan, dan saling mendukung.
5. Meningkatkan Dialog Antar Umat Beragama Meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar umat beragama untuk saling memahami dan membangun kerjasama demi terciptanya kedamaian dan keharmonisan.

Keyakinan seseorang biasanya terbentuk dari kepercayaan yang sudah tertanam dalam hati dan sulit untuk diubah atau dipengaruhi oleh orang lain, karena keyakinan tersebut merupakan hal yang sangat pribadi dan mendalam. Apalagi, dalam hal keyakinan terhadap Tuhan, setiap individu memiliki pandangan yang sangat pribadi yang tidak bisa begitu saja diubah oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghormati keyakinan orang lain, tanpa membedakan apapun, baik itu terkait agama atau kepercayaan lainnya. Setiap orang berhak untuk memiliki keyakinan yang mereka percayai, dan kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut.

Dalam hal agama, kita harus meyakini agama yang kita anut tanpa merasa perlu untuk merendahkan atau membandingkan dengan agama lain. Tidak ada agama yang lebih benar dari agama lainnya, karena semua memiliki pandangan dan ajaran yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Perbedaan agama seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk saling menghormati, bukan menjadi sumber perpecahan atau pertentangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, "Tetaplah bersikap saling menghormati, baik itu sesama Muslim maupun non-Muslim." Dengan saling menghormati, kita akan menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis, meskipun kita memiliki perbedaan dalam keyakinan dan pandangan hidup.

Peran Pancasila dalam menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia

Pancasila berperan sebagai alat pemersatu dan perekat bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman dalam suku, agama, bahasa, dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar untuk mendorong rasa nasionalisme dan menjaga persatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, mengandung nilai religius yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu yang sempurna dan suci. Nilai ini mencakup sifat-sifat Tuhan seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dapat diaplikasikan melalui tindakan menyayangi dan merawat alam serta menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara ini, kita menunjukkan rasa hormat terhadap ciptaan Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian alam (Dedees dalam Sianturi & Dinie, 2021:225).

Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang menuntut penghargaan terhadap hak dan martabat setiap individu. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup, dihormati, dan dilindungi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, nilai ini dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan kehidupan manusia, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan.

Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi segala perbedaan. Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk membela bangsa dan negara, menjunjung tinggi patriotisme, serta mengenali dan menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, nilai ini mengarah pada pentingnya kerjasama antarwarga negara, baik dalam hal pelestarian alam maupun dalam menjaga keberagaman budaya yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia juga menjadi landasan dalam menjaga kebersamaan dalam menjaga lingkungan (Sutiyono dalam Sianturi & Dinie, 2021:225).

Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, mengandung nilai demokrasi dan kerakyatan. Nilai ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana, melibatkan masyarakat dalam setiap proses keputusan, serta meningkatkan kesadaran kolektif untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil, serta mendorong kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka

dalam menjaga lingkungan. Selain itu, penting juga untuk membangun kemitraan yang solid antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan hidup harus dijaga demi kesejahteraan bersama, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan terdampak oleh kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga sebagai dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, agar alam tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Agar generasi muda dapat menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kuat, mereka perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan pemahaman mengenai gagasan, cita-cita, serta dasar negara yang mencakup pandangan yang mendalam tentang keberadaan manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Proses pemahaman ini dapat dimulai sejak usia dini, dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi (Puspita Ratri & Najicha, 2022). Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila tidak hanya didapatkan melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemahaman yang keliru terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berbahaya, karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Pancasila yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama

Konflik yang terjadi di Poso dapat dianggap sebagai konflik agama yang serius, karena tidak ada solusi yang efektif untuk mendamaikan kedua belah pihak. Konflik ini berlangsung tiga kali di Kota Poso, Sulawesi Tengah, dengan peristiwa besar terjadi pada 25 hingga 29 Desember 1999, 17 hingga 21 April 2000, dan 16 Mei hingga 15 Juni 2000. Dalam Sila Pertama Pancasila, terkandung prinsip untuk mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, yang bertujuan menciptakan kerukunan.

Landasan hukum terkait toleransi antarumat beragama di Indonesia terdiri dari:

1. Landasan Ideil, yaitu Sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 29 ayat 2 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan;
3. Landasan Operasional, yaitu Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 yang mengatur larangan dan pencegahan penodaan agama.

Di Indonesia, toleransi antarumat beragama dikenal dengan istilah "kerukunan hidup antarumat beragama," yang merupakan tujuan pembangunan di bidang keagamaan. Istilah ini digunakan secara resmi oleh pemerintah untuk menggambarkan pentingnya kerukunan

antarumat beragama, yang sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan yang ada. Ketegangan ini dapat muncul karena beberapa faktor, seperti:

1. Sifat masing-masing agama yang memiliki misi dakwah;
2. Kurangnya pemahaman umat beragama terhadap agama mereka sendiri maupun agama lain;
3. Kurangnya rasa hormat antar umat beragama, bahkan merendahkan agama lain;
4. Kaburnya batas antara memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat;
5. Kecurigaan terhadap niat pihak lain, baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dan pemerintah;
6. Kurangnya pemahaman dalam menghadapi perbedaan pendapat (Kemenag dalam Nur, 2019:43).

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembinaan kehidupan beragama, tidak hanya menjamin kebebasan beragama, tetapi juga memberikan pembinaan, pengembangan, dan bimbingan agar kehidupan beragama dapat berkembang secara harmonis dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, teori pembinaan kerukunan hidup beragama mengarah pada konsep trilogi kerukunan, yaitu:

1. Kerukunan intern umat beragama, yang mencakup upaya menciptakan kehidupan beragama yang damai di antara perbedaan mazhab, ormas, dan penafsiran agama;
2. Kerukunan antarumat beragama, yaitu kehidupan beragama yang harmonis antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan, tanpa saling curiga dan dengan saling menghormati;
3. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang berfokus pada kerja sama antara umat beragama dan pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan kesatuan bangsa (Kemenag dalam Nur, 2019:43).

Pembinaan kerukunan antarumat beragama juga dilakukan melalui dialog antar pemuka agama, yang lebih dari sekadar pertukaran pendapat, namun menjadi musyawarah bersama untuk menciptakan kerukunan.

Dalam kerangka pembinaan kehidupan beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menumbuhkan kesadaran beragama dan kepekaan sosial, serta menghindari fanatisme dan eksklusivisme, dan
2. Negara menjamin kebebasan beragama dan mendukung pengembangan kehidupan beragama dalam rangka pembangunan, memberikan kesempatan yang luas bagi setiap umat beragama untuk menjalankan keyakinan mereka.

KESIMPULAN

Pancasila memainkan peran krusial dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang mendukung harmoni di tengah masyarakat yang multikultural. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman keyakinan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sikap saling menghormati, partisipasi dalam kegiatan lintas agama, dan upaya membangun solidaritas melalui kerjasama lintas agama. Toleransi yang diajarkan oleh Pancasila bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, mengedepankan dialog, dan kerja sama untuk menghadapi tantangan seperti ekstremisme agama dan intoleransi. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang adil, damai, dan penuh toleransi di tengah keberagaman, serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada Bapak Neo Adhi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Penulisan Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Nini Tanamal. (2016). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 8 no.3, 1-8.
- Anandari Anatansyah Ayomi dan Dwi Afriyanto. (2022). Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol 11(1).
- Arfiansyah dkk. 2022. Toleransi Antar Umat Beragama Di Masyarakat Desa Jarak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2(2). 162-166.
- Derung dkk. (2022). Membangun Toleransi Umat Beragama dalam Masyarakat yang Majemuk. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*. Vol 2(8). 258-263.
- Fitriani, shofiah. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, vol 20. No. 2, h 179-192.
- Hartani Mallia & Soni Akhmad Nulhaqim. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol 2(2).

- Ginting, Widiyanti, Widodo. (2023). Peran Kampung Pancasila Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Toleransi di RW 03 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 7(2).
- Nur Irayanti. (2019). Penerapan Nilai-nilai Pancasila Melalui Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Batusitanduk Kabupaten Luwu. *Jurnal Pendidikan*. Vol 3(1). 39-50.
- Ryan, Guruh Aulia. 2023. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, vol 25 nomor 1, 18-29.
- Sianturi & Dinie (2023). Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 5(1). 222-231.
- Shaleh Ali Ismail & Fifiana Wisnaeni. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1(2)
- Subandi, S. (2020). Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan. *Harmonia journal of arts research and education*, 11(2), 62082.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Tamba dkk. 2023. Peran Pancasila Dalam Memupuk Persaudaraan Dan Toleransi Mahasiswa Di Kampus. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*. Vol 1(4). 97-103.
- Tlonaen, Saingo. (2023). Peran Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Perilaku Anti Ekstremisme Agama. Kupang. *Jurnal Multidisiplin West Science*. Vol 2(12).
- Utami, S. G. A., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi mahasiswa sebagai agent of change dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 96-101.
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179-192.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237-249.